

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah sebagai salah satu dari kebijakan yang masih berlangsung hingga saat ini, salahsatu asas dari otonomi daerah yaitu desentralisasi yang diterapkan ke seluruh daerah di Indonesia baik kota ataupun kabupaten diwajibkan untuk mengelola sendiri urusannya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 23 pasal 1 ayat 6 tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan juga kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.”

Tentunya, otonomi daerah (Otda) ini tak lepas kaitannya dengan pembangunan. Kota Bandung merupakan daerah yang laju perkembangan pembangunan daerahnya cukup pesat, dan menjadikan salah satu daerah yang bisa dikatakan sukses dalam menerapkan otda. Dengan terobosan inovasi otonomi daerah Kota Bandung terbukti dari beberapa misinya yang berbunyi, “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani” yang diwujudkan dengan cara *Smart Government* yang tentu terintegrasi demi terwujudnya pelayanan publik yang prima dan sesuai misi yang tercantum. Adapun misi lainnya yaitu “Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan” yang diwujudkan dengan cara pemenuhan kebutuhan

dasar serta sistem yang inklusif, daya dukung dari lingkungan dengan terintegrasi serta berkelanjutan yang memang diutamakan secara sinergis (PPID Kota Bandung).

Sebagaimana dalam **Arti Surat An-Nisa Ayat 58**

*“ Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan Adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar.”*

Terobosan inovasi tersebut diimplementasikan dalam bentuk sebuah program yang bernama Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan atau yang disingkat dengan sebutan PIPPK, program ini telah berjalan sejak 2015 dan telah memberikan dampak signifikan, salahsatu buktinya yaitu di tahun 2018 terealisasinya infrastruktur di wilayah-wilayah, yaitu 588.701 m<sup>2</sup> jalan yang telah diperbaiki, rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 106 unit juga WC umum sebanyak 339 unit guna kepentingan sanitasi, adanya rehabilitasi 491 kantor lembaga kemasyarakatan, 31.107 m<sup>2</sup> gorong-gorong juga saluran air, secara mandiri warga pun membangun ratusan gapura juga dalam bentuk kegiatan sosial, lomba-lomba, keagamaan sampai sosialisasi program dari pemerintah (Website Resmi Humas Bandung, 2019).

Dicanangkannya PIPPK ini sejalan dengan tiga pilar Kota Bandung yaitu desentralisasi, inovasi juga kolaborasi. Asep selaku Kepala Diskominfo Kota Bandung menyebutkan bahwa, tiga pilar ini memang harus diterapkan dan juga

dimiliki setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung (Fokus Jabar, 2018). Salahsatu SKPD yang memang langsung berkoordinasi dengan pemerintah sekaligus tingkat daerah yaitu tingkat Kecamatan, tingkat kecamatan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tiap-tiap program pemerintah yang memang menginstruksikan langsung ke tingkat Kelurahan mengenai program yang harus dilaksanakan itu bagaimana dan seperti apa.

Kecamatan Regol menjadi salah satu kecamatan di Kota Bandung yang didalamnya terdapat tujuh kelurahan. Dalam rekapitulasi realisasi PIPPK Kecamatan Regol memiliki presentase 94,53% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 436.518.826,15 yang dimana menjadi termasuk kedalam sepuluh kecamatan terendah realisasinya. Tahun 2019 pagu anggarannya itu sebesar Rp. 7.985.447.547,15 dengan realisasi anggarannya Rp. 7.103.891.821,00 (89%) se-Kecamatan Regol.

Program PIPPK yang sudah berjalan ini berarti memang belum terserap anggarannya dengan baik, terlihat dari data Laporan Realisasi Anggaran PIPPK di beberapa kelurahan di Kecamatan Regol dtiap tahunnya mengalami penurunan dalam hal penyerapan anggran program ini, beberapa diantaranya yaitu Kelurahan Balonggede, Kelurahan Ancol dan Kelurahan Cigereleng. Berikut data penyerapan anggaran PIPPK di Kelurahan Balonggede, Ancol dan Cigereleng periode 2015-2019.

**Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran PIPPK Regol Periode 2015-2019**

<b>Kelurahan Balonggede</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (RP)</b>	<b>Realisasi (RP)</b>	<b>Sisa Anggaran (RP)</b>
2015	1,133,200,000.00	1,092,724,580.00	40,475,420.00
2016	1,000,000,000.00	934,949,615.00	65,050,385.00
2017	852,678,367.00	767,295,150.00	85,383,217.00
2018	719,581,316.00	624,661,650.00	94,919,666.00
2019	995,709,085.00	954,456,700.00	41,252,385.00
<b>Kelurahan Ancol</b>			
2015	1,364,400,000.00	1,309,317,580.00	55,082,420.00
2016	1,200,000,000.00	1,086,338,920.00	113,661,080.00
2017	1,047,576,849.81	1,000,368,934.00	47,207,915.81
2018	985,459,157.57	921,813,903.00	63,645,254.57
2019	1,194,892,806.00	1,052,382,210.00	142,510,596.00
<b>Kelurahan Cigereleng</b>			
2015	1,692,000,000.00	1,542,643,320.00	167,356,680.00
2016	1,500,000,000.00	1,425,473,179.00	74,526,821.00

2017	1,452,621,246.50	1,253,782,908.00	198,838,388.50
2018	1,088,265,890.86	1,024,202,380.00	64,063,510.86
2019	1,496,752,417.87	1,354,997,770.00	141,754,648.00

Sumber: Kecamatan Regol Kota Bandung

Dari tabel yang disajikan, terlihat data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana kelurahan-kelurahan yang mengalami kelemahan atau penurunan dalam penyerapan anggaran PIPPK periode 2015-2019. Beberapa kelurahan tersebut, sesuai data realisasi anggaran yang tercantum terlihat semakin turun dari tahun ketahunnya, hal ini perlu dipertanyakan apakah realisasi yang turun ini di latarbelakangi karena lemahnya kinerja dalam pengelolaan anggaran.

Pengelolaan anggaran PIPPK ini tentu memiliki kaitan dengan kinerja keuangan, tujuan serta indikator kinerja yang menjadi termasuk kedalam pengembangan sistem penganggaran. Hal ini diperkuat dengan definisi kinerja yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan guna mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* organisasi (Mahsun, 2016:25). Cara mengetahui apakah kinerja dalam pengelolaan anggaran PIPPK Regol ini dapat dikatakan baik atau tidaknya, dilakukan dengan pengukuran kinerja yang berguna menjadi dasar dilakukannya penilaian kinerja yang dinilainya berhasil atau justru tidak pada suatu program, organisasi ataupun kegiatan. Oleh karena itu, perlunya dilakukan suatu penilaian

untuk melihat seberapa jauh kinerja dari kelurahan yang ada di Kecamatan Regol dalam mengelola anggaran PIPPK.

Dari uraian tersebut, maka peneliti merasa untuk dilakukannya penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Se-Kecamatan Regol Periode 2015-2019**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan identifikasi masalahnya yaitu:

1. Terdapat beberapa kelurahan yang berada di Kecamatan Regol yang masih kurang optimal dalam penyerapan anggaran PIPPK, diantaranya pada Kelurahan Balonggede, Ancol dan Cigereleng.
2. Pada Kelurahan Balonggede dalam realisasi anggaran PIPPK tahun 2015-2018 semakin menurun atau melemah pada penyerapan anggaran PIPPK.
3. Kecamatan Regol dalam rekapitulasi realisasi PIPPK nya memiliki presentase 94,53% yang termasuk kedalam sepuluh kecamatan yang terendah dalam realisasinya atau tepatnya termasuk kedalam peringkat 9 terendah.
4. Kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Regol masih didominasi dengan sisa anggaran PIPPK yang belum terealisasi cukup besar nominalnya..

## **C. Rumusan Masalah**

Berikut rumusan masalah yang peneliti merumuskan, yakni:

1. Bagaimana kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan analisis varians belanja di Kecamatan Regol periode 2015-2019?
2. Bagaimana kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan analisis keserasian belanja di Kecamatan Regol periode 2015-2019?
3. Bagaimana kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan analisis rasio efisiensi belanja di Kecamatan Regol periode 2015-2019?
4. Bagaimanakah kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan analisis pertumbuhan belanja di Kecamatan regol periode 2015-2019?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, adapun tujuan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui:

1. Kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan analisis varians belanja di Kecamatan Regol periode 2015-2019
2. Kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan analisis keserasian belanja daerah di Kecamatan Regol periode 2015-2019
3. Kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan analisis rasio efisiensi belanja periode 2015-2019
4. Kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan analisis pertumbuhan belanja periode 2015-2019

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi referensi mengenai kinerja pengelolaan anggaran dalam hal pengukuran analisis kinerja anggaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tambahan yang menyeluruh serta transparan kepada masyarakat terkait kinerja pengelolaan anggaran PIPPK seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Regol.

b. Bagi Akademis

Sebagai tambahan literatur serta dijadikan landasan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan kinerja PIPPK terutama bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Penulis

Membantu peneliti dalam pemenuhan sarana belajar, menambah nilai positif juga meningkatkan kualitas keilmuan peneliti juga sebagai tugas akhir kuliah serta menambah pengalaman peneliti yang khususnya terjun langsung ke perangkat daerah bidang keuangannya.

**F. Kerangka Pemikiran**

Program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota No. 436 Tahun 2015 mengenai Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) diimplementasikan ditataran lingkup terdekat dengan masyarakat yaitu RW, PKK, Karta, dan LPM yang bisa dicapai secara optimal dimulai dari tingkat bawah untuk mengambil segala keputusan serta pemecahan masalahnya melalui pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu terwujudnya pemerataan



pembangunan di daerah-daerah, oleh karena itu dalam pengelolaan anggarannya pun perlunya kinerja yang baik di tiap SKPD terutama Kecamatan yang dimana berposisi sebagai tingkatan yang langsung memperoleh instruksi dari Pemerintah Kota dan yang bertugas langsung menginstruksikannya ke tingkat Kelurahan untuk langsung direalisasikan di RW, Karta, LPM juga PKK.

Kinerja adalah gambaran tingkat suatu pencapaian pelaksanaan kegiatan/kebijakan/program guna mewujudkan suatu sasaran, tujuan, visi, misi yang tertuang di *strategic planning* organisasi (Mahsun:2016:25). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian hasil kerja pada bidang keuangan daerah yang terdapat anggaran juga realisasinya memakai indikator keuangan dari kebijakan juga ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran (Adhiantoko, 2013),

Menurut Nordiaman & Hertianti (2014:157-158) pengukuran kinerja adalah alat (instrumen) guna menilai hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan terhadap sasaran serta tujuan kegiatan yang memang sudah ditetapkan. Dalam melakukan penelitian ini, untuk menilai apakah kinerja bisa dikatakan baik tidaknya disini penulis menggunakan alat analisis kinerja anggaran belanja dimana alat analisis ini bisa untuk mengukur kinerja dalam pengelolaan anggaran PIPPK. Menurut Mahmudi (2019:154) alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja anggaran, berupa:

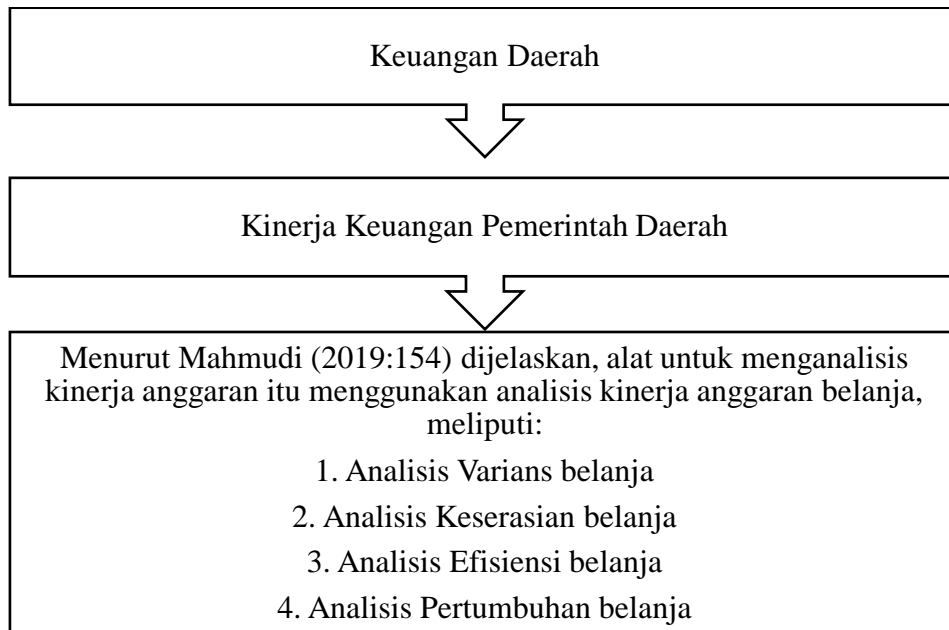
1. Analisis Varians belanja, yaitu analisis terhadap adanya selisih atau perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja. Selisih ini bisa memberikan dua

kemungkinan antara memang adanya efisiensi anggaran atau memang malah tidak terserap anggaran karna memang ada kegiatan yang belum terlaksana, jadi kinerja dinilai kurang baik jika selisihnya memang banyak dan kinerja yang bisa dikatakan baik bila selisihnya sedikit. Rumusnya, *analisis varians belanja = realisasi belanja - anggaran belanja*.

2. Analisis keserasian belanja, yaitu untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Analisis rasio belanja operasional terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja. Rumusnya, *belanja operasional = realisasi belanja operasional : total belanja daerah x 100%* dan rumus *belanja modal = realisasi belanja modal : total belanja daerah x 100%*
3. Analisis rasio efisiensi belanja, yaitu perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasi anggaran yang diperuntukkan mengukur tingkat penghematan anggaran. Rumusnya, *realisasi anggaran : anggaran belanja x 100%*.
4. Analisis pertumbuhan belanja, yaitu perkembangan belanja dari tahun ke tahunnya untuk mengetahui kerasionalan pertumbuhan yang dapat dipertanggungjawabkan. Rumusnya, *realisasi belanja tahun t = realisasi belanja tahun t - realisasi belanja tahun t-1 : realisasi belanja tahun t-1 x 100%*

Berikut kerangka pemikiran untuk digunakan dalam penelitian:

### **Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



Sumber: dalam *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Mahmudi 2019:154 (data diolah)

## G. Proposisi

Analisis kinerja pengelolaan anggaran program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Regol akan terlaksana dengan baik jika melaksanakan 4 (empat) dimensi tersebut dan hasilnya sesuai dengan taraf nilai yang telah ditentukan dalam setiap analisis kinerja anggaran belanja. Keempat analisis kinerja anggaran belanja tersebut adalah analisis varians belanja, analisis keserasian belanja, analisis rasio efisiensi belanja, dan analisis pertumbuhan belanja.